BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat

Perkembangan dunia usaha perkeretaapian di Indonesia merupakan sejarah panjang, sejarahnya dimulai sejak jaman Hindia Belanda saat pemerintah Gubernur Jendral MR. Sloet Van Beele.

Pertama kali dilakukan pembangunan lintasan kereta api sepanjang 26 Km antara Semarang (Kamijen) – Tanggung Jawa Tengah pada tanggal 17 Juni 1864. lintasan ini sebenarnya merupakan bagian dari lintasan kereta api Semarang-Solo yang selesai dibangun 18 Februari 1870, pembangunan ini kemudian dilanjutkan pengoperasian lintasan ini oleh NIS (Nederlansche Indische Spoorweg Maat Schapij).

Kehadiran lintasan itu lalu diikuti dengan pembangunan lintasan lainnya dapat dicatat pembangunan lintasan kereta api Jakarta-Bogor (1873), Ulele Kutaraja, Banda Aceh (1876), Labuan-Belawan Sumatera Utara (1886), Teluk Betung-Prabumulih Sumatera Selatan (1912) dan lintasan kereta api Makassar-Takalar Sulawesi Selatan (1923). Pembangunan lintasan-lintasan tersebut pada umumnya dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan swasta.

Dengan adanya pembangunan listasan tersebut, menjelang perang dunia II di Indonesia terdapat lintasan kereta api yang panjangnya mencapai 7572 Km tersebar di Jawa, Sumatera dan Sulawesi, diantaranya sepanjang 4350 Km milik

pemerintah Hindia Belanda dan sisanya sebanyak 3022 Km milik pengusaha swasta.

Pada jaman pendudukan Jepang, seluruh lintasan diambil oleh bala tentara Jepang. Untuk pengelolaannya Jepang membentuk sebuah perusahaan dengan nama "Rikuku Kyoku" yang kemudian dirubah menjadi "Tedsudo Kyoku" yang berkantor pusat di Bandung. Sedangkan untuk jaringan kereta api Sumatera diberi nama "Tedsudo Tai" berkantor pusat di Bukittinggi.

Sepeninggal Jepang setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 agustus 1945, para pemuda pekerja perkeretaapian yang tergabung dengan Angkatan Muda Kereta Api (AMKA) melakukan aksi pengambil alihan seluruh kekuasaan penyelenggara perkeretaapian dari tangan Jepang. Pengambilalihan ini juga dilakukan didaerah lainnya dimana terdapat lintasan kereta api.

Setelah semua asset lintasan kereta api diambil alh, kemudian dibentuk Djawatan Kereta Api Republik Indonesia(DKARI) berdasarkan hasil pertemuan yang dilakukan di Bandung tanggal 30 September 1945. saat itu pemerintahan Indonesia menunjuk Mr. Soewachjo sebagai penanggung jawab.

Memasuki masa perang kemerdekaan (1945-1950), dengan adanya usaha Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia, keadaan ini juga berpengaruh terhadap dunia perkeretaapian. Situasi yang bergolak mengakibatkan kantor pusat DKARI selalu berpindah-pindah antara lain ke Cisuruan, Gombong, Yogyakarta, Jakarta dan akhirnya kembali lagi ke Bandung. Pada daerah-daerah yang dikuasai Belanda membentuk perusahaan kereta api sendiri dengan nama "Staat Spoorwegen Wreniged Spoor Wegbedriff".

Setelah penyerahan kekuasaan kepada pemerintah Indonesia tanggal 29 Desember 1949, maka pada tanggal 9 Januari 1950 pemerintah kemudian memutuskan untuk menyatukan kepengurusan lintasan kereta api dibawah pengelolaan DKARI. Status perusahaan kemudian berubah menjadi perusahaan Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 1963 tanggal 25 Mei 1963 dengan nama Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA), berdasarkan Peraturan Pemerinah nomor 61 tahun 1971 status perusahaan dirubah kembali menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) dan menjadi salah satu organisasi yang berada dibawah naungan Departemen Perhubungan, terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1990 tanggal 30 September 1990, pemerintah kembali merubah status PJKA menjadi perusahaan umum dengan nama Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA). Perubahan status ini dimaksudkan untuk memberi peluang kepada PERUMKA agar lebih luwes dalam mengembangkan usahanya.

kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1998 tanggal 3 Februari 1998, pemerintah kembali melakukan pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api menjadi perusahaan terbatas (Persero). Perubahan status ini dimaksudkan untuk meyelenggarakan usaha sebagai berikut :

a. Usaha pengangkutan orang dan barang dengan kereta api
b. Kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian
c. Pengusahaan prasarana kereta api
d. Pengusahaan usaha penunjang sarana dan prasarana kereta api

2.2 Falsafah, visi, misi dan sasaran PT KAI (Persero)

2.2.1 Falsafah PT. KAI (Persero) :

Penyediaan jasa angkutan kereta api harus diselenggarakan secara efektif dan efisien, berprinsip pada ekonomi perusahaan dengan mutu pelayanan yang makin baik dan berwawasan pada :

1. Tanggap terhadap lingkungan
2. Kebanggaan terhadap perusahaan
3. peningkatan pelayanan secara efektif dan efisien
4. Mendorong pembangunan
5. Kemauan untuk bekerja keras dan sadar usaha dan biaya

2.2.2 Visi PT. KAI (Persero)

Terwujudnya kereta api sebagai pilihan utama jasa transportasi dengan focus keselamatan dan pelayanan.

2.2.3 Misi PT. KAI (Persero)

Perusahaan dapat tumbuh dan berkembang pesat, memiliki citra yang baik sehingga mendsapatkan kepercayaan masyarakat, memperoleh laba yang optimal, dan dapat memuaskan dan menyejahterakan seluruh karyawannya.

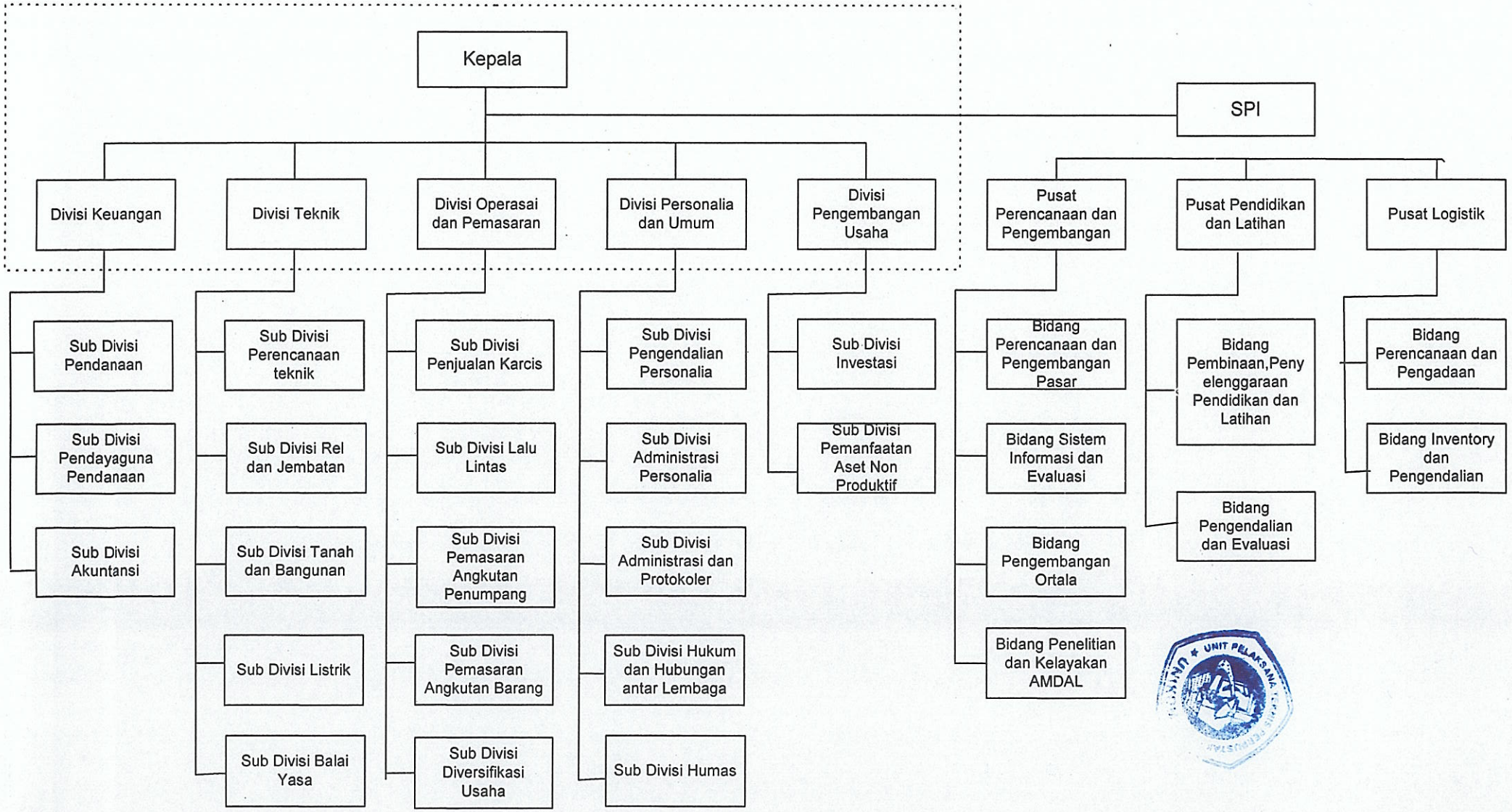
2.2.4 Sasaran PT. KAI (Persero) :

Berdasarkan falsafah, visi dan misi PT. KAI (Persero) maka sasaran perusahaan adalah sebagai berikut :

a. Kuantitatif, secara terus menerus dan bertahap meningkatkan kinerja pelayanan dan keuangan melalui berbagai strategi pertumbuhan, antara

Gambar 2.1

Struktur Organisasi PT KAI(Persero) DAOP II Bandung



lain peningkatan produktifitas, efektifitas, efisiensi serta investasi secara selektif

b. Kualitatif, memproyeksikan pertumbuhan angkutan penumpang rata-rata 4,68% per tahun, sasaran kinerja tahun 2004 dapat mengangkut 241,66 Juta penumpang atau 22,192 Milyar per Km, dan memproyeksikan pertumbuhan angkutan barang rata-rata 4,29% per tahun, sasaran tahun 2004 dapat mengangkut 23,43 Juta ton barang atau 6,431 Milyar per Km.

2.3 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan

2.3.1 DAOP II Bandung

Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 tahun 1991 dalam buku Pedoman dan Tata kerja PT. KAI susunan organisasi Daerah Operasi II Bandung adalah sebagai berikut :

A. Kepala

Tugas pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Memimpin, mengurus dan menelola PT. KAI DAOP II Bandung sesuai tujuan dan tugas pokok perusahaan.
2. Melaksanakan kebijakan umum yang ditentukan oleh tingkat pusat
3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku
4. Memberikan segala keterangan tentang keadaan jalannya PT. KAI (Persero) DAOP II Bandung, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun laporan berkala.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala daerah operasi mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. Pengelolaan keuangan PT. KAI
b. Pengembangan organisasi dan manajemen PT. KAI
c. Pengembangan dan pendayagunaan sumber daya manusia
d. Pengusahaan dan pengembangan sarana dan prasarana kereta api
e. Pengawasan internal

Fungsi dan tugas masing-masing divisi adalah sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan (DK)

Divisi Keuangan adalah satuan organisasi di lingkungan PT. KAI (Persero) DAOP II Bandung. Divisi Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab kepada Kepala DAOP II Bandung.

Divisi keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala DAOP II Bandung dalam merumuskan kebijakan serta mengelola keuangan perusahaan yang meliputi penyediaan dana baik untuk modal kerja dan investasi, pelaksanaan administrasi keuangan atau pembendaharaan, pelaksanaan Akuntansi Manajemen, Akuntansai Keuangan, serta membantu pengurusan barang inventaris kekayaan milik Negara.Untuk melaksanakan tugas tersebut direktorat keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan dan perumusan peraturan keuangan perusahaan, pelaksanaan administrasi anggaran daerah operasi II Bandung, pengesahan pembayaran baik internal maupun eksternal transaksi keuangan.

2. Penyiapan laporan keuangan perusahaan pada tingkat daerah operasi II Bandung, pelaksanaan verifikasi pendapatan dan buku kas serta pelaksanaan pengurusan barang inventaris kekayaan milik Negara.

Divisi Keuangan terdiri dari :

a. Sub Divisi Pendanaan
b. Sub Divisi Pendayagunaan Pendanaan
c. Sub Divisi Akuntansi

2. Divisi Teknik

Divisi Teknik mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis dan perumusan pembinaan pemeliharaan prasarana pokok berupa jalan rel, jembatan, perangkat signal, telekomunikasi, dan instalasi listrik umum dan listrik aliran atas serta pemeliharaan dan perbaikan sarana Balai Yasa, perencanaan maupun pemeriksaan sarana dan prasarana pendayagunaan tanah dan bangunan.Untuk melaksanakan tugas tersebut Divisi eknik mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program pemeliharaan dan perbaikan prasarana pokok jaln rel, serta pelaksanaan penyusuna program pemeriksaan, perbaikan, perencanaan konstruksi dan desain jembatan
2. Penyusunan program pendayagunaan tanah dan bangunan
3. Penyusunan program pemasangan baru perangkat sinyal, telekomunikasi sentral listrik umum dan listrik aliran atas

Divisi Teknik terdiri dari :

a. Sub Divisi Perencanaan tehnik
b. Sub Divisi Jalan rel dan jembatan
c. Sub Divisi tanah dan bangunan
d. Sub Divisi sinyal, telekomunikasi dan listrik
e. Sub Divisi Balai Yasa

3. Divisi Operasi dan Pemasaran

Divisi Operasi dan Pemasaran mempunyai tugas membuat rumusan pedoman pembinaan teknis operasional serta menyusun program operasi lalu lintas perjalanan kereta api, program pemasaran angkutan penumpang dan barang, program pengusahaan jasa angkutan lain yang terkait dengan tugas pokok.Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Divisi Operasi dan Pemasaran mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan rencana dan pendayagunaan traksi lokomotif, kereta dan gerbong
2. Pelaksanaan dan pendayagunaan traksi pemasaran angkutan penumpang
3. Pelaksanaan dan pendayagunaan traksi pemasaran angkutan barang
4. Pelaksanaan dan pendayagunaan traksi lokomotif, operasi lalu lintas perjalanan kereta api

Divisi Operasi dan Pemasaran terdiri dari :

a. Sub Divisi penjualan karcis
b. Sub Divisi Lalu lintas
c. Sub Divisi pemasaran penumpang

d. Sub Divisi Pemasaran angkutan barang

e. Sub Divisi Diversifikasi usaha

4. Divisi Personalia dan Umum

Divisi Personalia dan Umum memiliki tugas untuk menyusunrencana pengembangan, produktivitas dan pengendalian personil serta pembinaan Hygiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, pelaksanaan program mutasi dan administrasi personalia, pelaksanaan kegiatan hokum dan hubungan antar lembaga serta hubungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut Divisi Personalia dan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program pengembangan, produktivitas dan pengendalian personil, kesehatan dan keselamatan kerja
2. Pelaksanaan program mutasi dan administrasi personalia
3. Pelaksanaan kegiatan administrasi umum, tata naskah, urusan kerumahtanggaan, protokoler, penyedian dan pengendalian akomodasi.
4. Penyusunan peraturan-peraturan dinas, penyelesaian masalah hokum, pertimbangan hokum dalam pembuatan kontrak perjanjian
5. Pelaksanaan kegiatan program hubungan kemasyarakatan

Divisi Personalia dan Umum terdiri dari :

a. Sub Divisi Perencanaan, pengembangan dan pengendalian personalia

b. Sub Divisi Administrasi personalia

c. Sub Divisi Administrasi umum, kerumahtanggaan dan protokoler

d. Sub Divisi Hukum dan hubungan antar lembaga

e. Sub Divisi Humas

5. Divisi Pengembangan Usaha

Divisi Pengembangan Usaha mempunyai tugas dalam pengelolaan investasi perusahaan yang bersifat pengembangan usaha baik dari dana internal maupun eksternal, serta merencanakan pemanfaatan asset non produktif dengan berdasarkan prinsip kelayakan financial, merencanakan investasi untuk rehabilitasi asset. Untuk melaksanakan tugas tersebut Divisi pengembangan usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penilaian kekayaan dan penyiapan administrasi pelaksanaan investasi, meliputi pengadaan sarana, fasilitas operasional dan pemeliharaan
2. Penilaian kelayakan pengembangan dan pemanfaatan asset non produktif

Divisi Pengembangan Usaha terdiri dari :

a. Sub Divisi Investasi
b. Sub Divisi Pengembangan dan pemanfaatan asset non produktif

6. Pusat Perencanaan dan Pengembangan

Pusat perencanaan dan pengembangan mempunyai tugas untuk menyusun system informasi dan evaluasi perusahaan, pengembangan organisasi dan tata laksana, penelitian dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pusat perencanaan dan pengembangan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana jangka panjang dan pengembangan pasar
2. Penyusunan informasi dan evaluasi perusahaan

3. Pengembangan organisasi dan tata laksana
4. Penelitian AMDAL

Pusat Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari :

a. Bidang Penyusunan rencana jangka panjang dan pengembangan pasar
b. Bidang Sistem informasi dan evaluasi perusahaan
c. Bidang Pengembangan organisasi dan tata laksana
d. Bidang penelitian dan analisis dampak lingkungan

7. Pusat Pendidikan dan Latihan

Pusat Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas untuk membina, mengendalikan, mengevaluasi dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di lingkungan perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Pusat Pendidikan dan Latihan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembinan dan penyelenggaraan :
   a. Pendidikan dan pelatihan awal
   b. Pendidikan dan pelatihan prajabatan
   c. Pendidikan dan pelatihan penjenjangan fungsional
   d. Pendidikan dan pelatihan penjenjangan structural
   e. Pendidikan dan pelatihan penataran
2. Pengendalian kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :

a. Bidang bina program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
b. Bidang pengendalian, evaluasi dan kesekretariatan

8. Pusat Logistik

Pusat Logistik mempunyai tugas untuk menganalisis dan merencanakan pengadaan barang, pengaturan pengendalian persedian barang-barang, penyimpanan dan distribusi, penghapusan barang perusahaan dan pembinaan personil logistic. Untuk melaksanakan tugas terbut Pusat Logistik mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pengadaan sarana, prasarana, fasilitas barang umum dan tata laksana administrasi impor/inklaring.
2. Pengendalian persediaan penyimpanan pengujian, pendistribusian, pengelolaan system informasi di bidang logistic
3. Penyimpanan barang gudang
4. Pelaksanaan cetakan pusat logistik

Pusat Logistik terdiri dari :

a. Bidang perencanaan dan pengadaan
b. Bidang inventory dan pendalian

9. Satuan Pengawasan Intern (SPI)

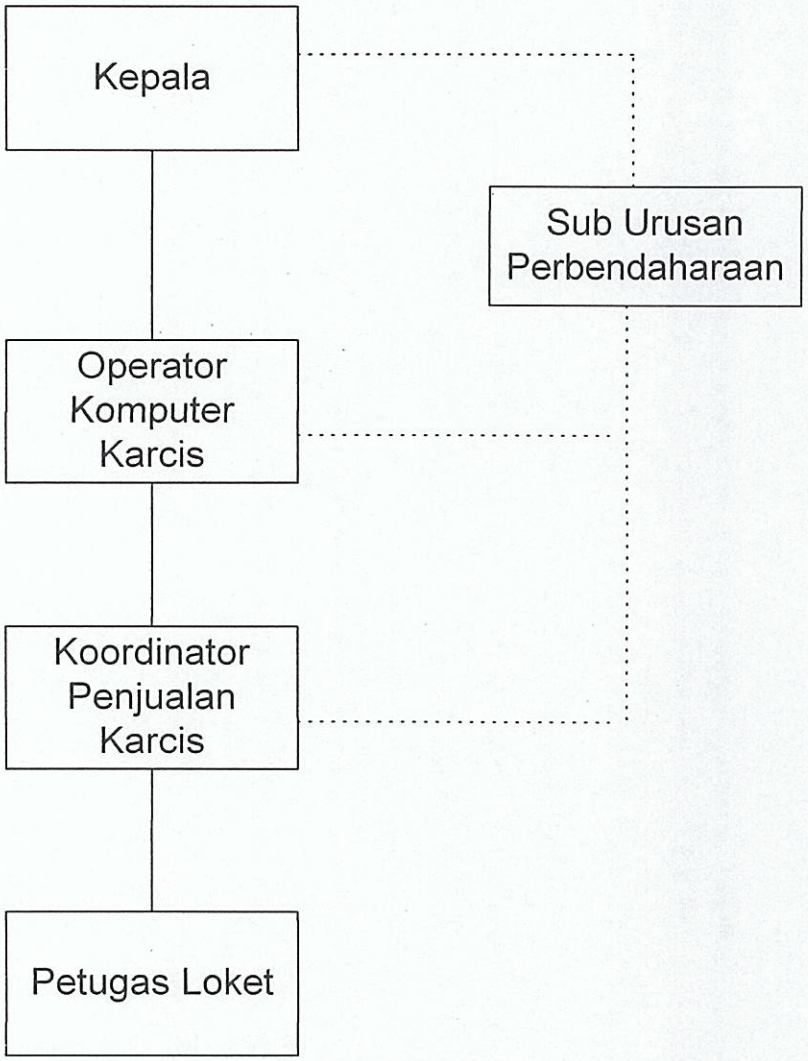
Satuan Pengawasan Intern mempunyai tugas untuk mengadakan pemeriksaan intern perusahaan dan memberikan saran perbaikan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Satuan Pengawas Intern (SPI) mempunyai fungsi :

1. Pengawasan manajemen, pengujian dan penilaian atas hasil laporan dibidang keuangan
2. Pengawasan manajemen, pengujian dan penilaian atas hasil laporan dibidang teknik pemeliharaan dan teknik sarana
3. Pengawasan manajemen, pengujian dan penilaian atas laporan dibidang operasi dan pemasaran
4. Pengawasan manajemen, pengujian dan penilaian atas hasil laporan di bidang administrasi personalia dan umum serta administrasi pendidikan dan pelatihan
5. Pengawasan manajemen, pengujian dan penilaian atas hasil laporan dibidang pengembangan usaha
6. Pengawasan manajemen, pengujian dan penilaian atas hasil laporan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian teknologi informasi dan system informasi
7. Pengawasan manajemen, pengujian dan penilaian atas hasil laporan dibidang perlengkapan (logistic)

- Satuan Pengawasan Intern (SPI) terdiri dari :
    a. Pengawas I
    b. Pengawas II
    c. Pengawas III
    d. Pengawas khusus

Gambar 2.2

STRUKTUR ORGANISASI
SUB DIVISI PENJUALAN KARCIS



2.3.2 Sub Divisi Penjualan Karcis

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Kereta Api No.Kep.U./OT.103/IX/9/KA.98 tanggal 16 September 1998 Bab II Pasal 6 ayat 3(a) tentang Tugas Koordinator Penjualan Karcis PT KAI (Persero) Daerah Operasi II Bandung. Dari Keputusan direksi di atas dapat dilihat bahwa Koordinator karcis merupakan bagian dari struktur organisasi Sub Divisi Penjualan Karcis PT KAI (Persero) DAOP II Bandung . tugas utama dari Sub Divisi Penjualan Karcis adalah melaksanakan program penjualan karcis angkutan penumpang dan barang, serta program pengusahaan jasa angkutan lain

Susunan struktur organisasi Sub Divisi Penjualan karcis PT KAI (Persero) DAOP II Bandung terdiri dari :

A. Kepala

Tugas pokok :

1. Memimpin, mengurus dan mengelola Sub Divisi Pemasaran Angkutan Penumpang
2. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Kepala PT KAI DAOP II Bandung
3. Membuat laporan tentang pemasaran dan angkutang penumpang

B. Petugas Loket

Petugas loket pada dasarnya hanya memiliki dua tugas yaitu mencatat penerimaan karcis dan membukukan hasil penjualan karcis. Untuk selanjutnya pembukuan hasil penjualan karcis disetorkan kepada Koordinator penjualan karcis

C. Koordinator Penjualan Karcis

Tugas dari coordinator penjualan karcis adalah melakukan pembukuan bentuk no.215 berdasarkan data penumpang setiap harinya. Dan apabila ada pembatalan dari konsumen terhadap karcis yang telah dipesannya maka fisik karcisnya harus dilampirkan dalam pembukuannya.

D. Operator Komputer Karcis

Operator Komputer Karcis tugasnya adalah mengakses penjualan dan melakukan pembukuan hasil penjualan karcis. Data tersebut diperoleh dari file yang ada pada computer

E. Sub Urusan Pembendaharaan

Tugas dari Sub Urusan Pembendaharaan adalah mencocokan hasil pencatatan pembukuan dengan jumlah nominal yang disetorkan.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Karena PT KAI (Persero) merupakan salah satu BUMN yang bergerak dibidang jasa transportasi maka aspek kegiatan perusahaan adalah mengusahakan pelayanan jasa angkutan kereta api dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang atau barang untuk menunjang pembangunan nasional.

Selain itu PT KAI (Persero) Daerah Operasi II Bandung juga menyelenggarakan usaha sebagai berikut :

a. Kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian
b. Pengusahaan prasaran perkereta apian

c. Pengusahaan usaha penunjang prasarana dan sarana kereta api

d. Usaha pengangkutan orang dan barang dengan kereta api